

TESIS

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL



Oleh

GUSTI NOVITA HANDAYANI

NIM. 2320215320111

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2025

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

GUSTI NOVITA HANDAYANI

NIM. 2320215320111

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Nama : Gusti Novita Handayani
NIM : 2320215320111

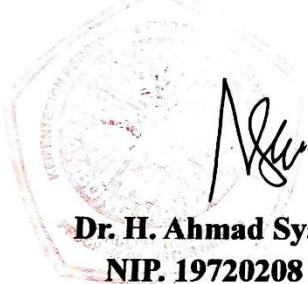

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



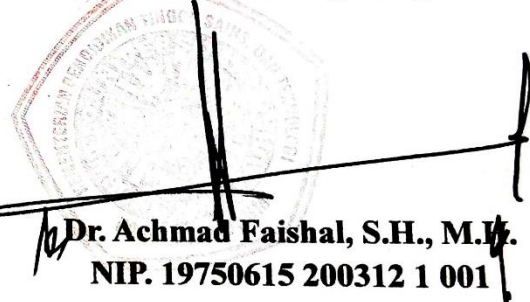

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

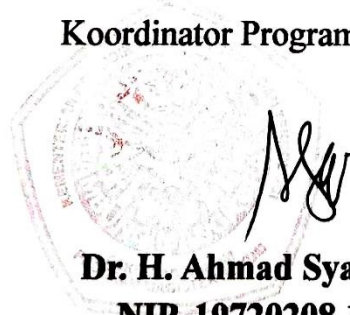
Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Selasa, 01 Juli 2025

Pembimbing



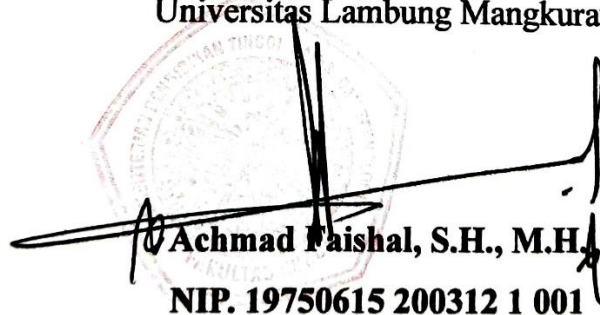
Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan
di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
pada Selasa, 01 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTO

Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadits Riwayat Bukhari**)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Gusti Hermansyah** dan **Ibu Nora Kusmirawati** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Kakak tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada **Gusti Annisa Indah Sari** yang telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen pembimbing tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Novita Handayani
NIM : 2320215320111
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 02 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Gusti Novita Handayani

NIM. 2320215320111

Handayani, Gusti Novita. 2025. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 halaman.

RINGKASAN

Perkembangan kehidupan bermasyarakat serta kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang belum pernah diatur sebelumnya. Tak hanya sifatnya yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi turut menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Atas besarnya dampak yang ditimbulkan, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Atas hal tersebut, terdapat beberapa penyimpangan dalam pengaturan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan tindak pidana umum sebagaimana yang termuat dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Atas dasar berbagai penyimpangan tersebut pula lah tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri di luar kodifikasi, yaitu oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring dengan perkembangannya, beberapa ketentuan pasal tindak pidana korupsi ditarik keberadaannya ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaharuan hukum pidana nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dari isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Problem normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi yaitu adanya ketentuan pasal tindak pidana korupsi yang secara langsung menyimpangi ketentuan pidana umum sebagaimana yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi itu pun tidak dapat dilepaskan dari upaya penyesuaian pada pola pemidanaan yang baru sehingga terjadi penurunan ancaman pidana yang diancamkan. Di sisi lain, muncul potensi terjadinya dualisme hukum dalam hal dilaksanakannya masa peralihan sebagaimana yang ditawarkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formulasi pengaturan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sifat tindak pidana korupsi yang dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui undang-undang tersendiri di luar kodifikasi. Berkaitan dengan itu, dengan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, maka dalam upaya perkembangan formulasi pengaturan tindak pidana korupsi harus berpedoman pada konvensi tersebut. Dalam hal ini, upaya perkembangan formulasi tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam undang-undang tersendiri yang diiringi dengan mengadopsi berbagai ketentuan baru sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi anti korupsi tersebut.

Handayani, Gusti Novita. 2025. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana

Sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan itu, pengaturan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dan tersendiri di luar kodifikasi. Namun seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus dimuat dalam kodifikasi berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *problem* normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk menganalisis formulasi ideal pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual yang didasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah yang dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.

Pertama, *problem* normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi yaitu adanya ketentuan pasal tindak pidana korupsi yang secara langsung menyimpangi ketentuan pidana umum sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, formulasi pengaturan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sifat tindak pidana korupsi yang dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui undang-undang tersendiri di luar kodifikasi dengan berpedoman pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

Handayani, Gusti Novita. 2025. Regulation of Corruption Crimes in Law Number 1 of 2023 from the Perspective of National Criminal Law Reform. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 pages.

ABSTRACT

Keywords: corruption, criminal law reform

*Since the enactment of the Law on the Eradication of Corruption Crimes, the regulation of corruption crimes has been specifically and separately governed outside of codification. However, along with its development, corruption crimes, as one of the special offences, have been included in the codification in the form of Indonesian Penal Code. Therefore, the purpose of this research is to analyze the normative issue of regulating corruption offences in Indonesian Penal Code and to analyze the formulation of regulation of corruption offences based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*.*

This research is a normative legal research conducted by library research and is a prescriptive in nature, utilizing the legislative approach by examining all regulations related to the legal issues, conceptual approach based on prevailing doctrines, and historical approach that involves the background of the issues.

First, the normative problem of regulating corruption offences in codification is the existence of articles about corruption offences that directly deviate from the general criminal provisions in Indonesian Penal Code. Second, the formulation of corruption offences, which must be addressed extraordinarily, needed comprehensive regulations outside the codification, guided by United Nations Convention Against Corruption.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Ketua Panitia Penguji Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Sekretaris Panitia Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
6. teman-teman terdekat peneliti, Anggara Yuda Pratama dan Muna Maulida, teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, khususnya **Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**, yang telah memberikan dukungan selama menempuh perkuliahan;
7. **Otan, Sapi, dan Beti**; serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan

akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

GUSTI NOVITA HANDAYANI
NIM. 2320215320111

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	38
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II <i>PROBLEM</i> NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN PASAL 187 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	46
A. Hukum Pidana Khusus dalam Hukum Pidana.....	46
B. Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional	61
BAB III FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN ASAS <i>LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI</i>	75
A. Kedudukan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Lex Specialis</i>	75
B. Formulasi Ideal Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana	84
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP